

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR



**INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada triwulan I sebagai pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama triwulan I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar disebutkan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pembinaan dan pengawasan, Inspektorat Kota Pematangsiantar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inpektorat Daerah; dan
- h. Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kota Pematangsiantar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Target Perjanjian Kinerja :

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level/Nilai Kapabilitas APIP	3
2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level/Nilai Maturitas SPIP	3
3	Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko	Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko	3
4	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	78 %
		Opini BPK atas LKPD	WTP
5	Meningkatnya Akuntabilitas pada Komponen Pengawasan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
		Inovasi	1

2. Target Anggaran pada Inspektorat :

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.218.634.992
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.795.788.524
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.795.788.524
	2. Administrasi Kepegawaian Daerah	1.349.285.600
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;	1.147.727.000
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	201.558.600
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	557.877.101
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor;	6.478.450
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	9.936.611
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.920.000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;	35.783.040
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	447.159.000
	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.600.000
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	899.655.726
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	899.655.726

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
2	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat; - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	432.941.791 129.586.791 77.515.000 225.840.000
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	183.086.250 142.530.000 40.556.250
3	Program Penyelenggaraan Pengawasan 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; - Reviu Laporan Kinerja; - Reviu Laporan Keuangan; - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.731.900.000 1.217.500.000 409.180.000 302.950.000 41.660.000 72.956.000 390.754.000
	2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	514.400.000 21.940.000 492.460.000
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	708.746.664 54.194.000 25.086.000 29.108.000
	2. Pendampingan dan Asistensi - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah; - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi; - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	654.552.664 142.650.000 173.130.000 278.802.664 61.380.000
	Jumlah	12.659.281.656

B. PROGRES RENCANA PENCAPAIAN TARGET KINERJA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Prosentase Proges Rencana Pencapaian Target Kinerja			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level/Nilai Kapabilitas APIP	25 %	50%	75%	100 % / 3
2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level/Nilai Maturitas SPIP	25 %	50%	75%	100 % / 3
3	Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko	Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko	25 %	50%	75%	100 % / 3
4	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	25 %	50%	75%	100% / 78 %
		Opini BPK atas LKPD	25 %	50%	75%	100% /

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Prosentase Proges Rencana Pencapaian Target Kinerja			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
						WTP
5	Meningkatnya Akuntabilitas pada Komponen Pengawasan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	25 %	50%	75%	100 % / B
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	25 %	50%	75%	100% / 80
		Inovasi	25 %	50%	75%	100% / 1 inovasi

C. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran Inspektorat untuk tahun anggaran 2024 triwulan I sampai dengan laporan ini dibuat, dapat dilihat pada table berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level/Nilai Kapabilitas APIP	3	Proses	25%
2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level/Nilai Maturitas SPIP	3	Proses	25%
3	Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko	Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko	3	Proses	25%
4	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	78 %	Proses	25%
		Opini BPK atas LKPD	WTP	Proses	-
5	Meningkatnya Akuntabilitas pada Komponen Pengawasan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	Proses	25%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	Proses	25%
		Inovasi	1	Proses	25%

Capaian Kinerja Keuangan Program Inspektorat triwulan I Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.218.634.992	1.998.047.803	19,55
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.795.788.524	1.491.183.358	21,94
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.795.788.524	1.491.183.358	21,94
	2. Administrasi Kepegawaian Daerah	1.349.285.600	367.093.899	27,21
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1.147.727.000 201.558.600	362.228.899 4.865.000	31,56 2,41

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	557.877.101	97.671.350	17,51
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor;	6.478.450	0	0,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	9.936.611	0	0,00
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.920.000	3.816.000	8,31
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;	35.783.040	0	0,00
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	447.159.000	93.855.350	20,99
	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.600.000	0	0,00
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	899.655.726	0	0,00
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	899.655.726	0	0,00
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	432.941.791	23.000.252	5,31
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;	129.586.791	10.600.000	8,18
	- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, dan Listrik;	77.515.000	12.400.252	16,00
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	225.840.000	0	0,00
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	183.086.250	19.098.944	10,43
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;	142.530.000	19.098.944	13,40
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.556.250	0	0,00
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.731.900.000	289.445.400	16,71
	3. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.217.500.000	207.267.400	17,02
	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;	409.180.000	47.025.000	11,49
	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;	302.950.000	73.642.000	24,31
	- Reviu Laporan Kinerja;	41.660.000	33.428.000	80,24
	- Reviu Laporan Keuangan.	72.956.000	0,00	0,00
	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	390.754.000	53.172.400	13,61
3	4. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	514.400.000	82.178.000	15,98
	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;	21.940.000	0	0,00
	- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	492.460.000	82.178.000	16,69
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	708.746.664	23.344.400	3,29
	3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	54.194.000	0	0,00
	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	25.086.000	0	0,00
	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	29.108.000	0	0,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	4. Pendampingan dan Asistensi	654.552.664	23.344.400	3,57
	- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;	142.650.000	15.844.400	11,11
	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;	173.130.000	0	0,00
	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;	278.802.664	7.500.000	2,69
	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	61.380.000	0	0,00
	Jumlah	12.659.281.656	2.310.837.603	18,25

D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja Keluaran (*Outcome*) Program Inspektorat

Sampai dengan berakhirnya triwulan I Tahun Anggaran tahun 2024, capaian kinerja (*outcome*) masing-masing program tersebut secara umum masih menggunakan capaian pada akhir tahun anggaran 2023 karena penilaiannya dilakukan pada akhir tahun anggaran berjalan. Adapun capaian tersebut antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Outcome dari program ini adalah nilai AKIP perangkat daerah, hingga berakhirnya triwulan pertama nilainya adalah B, yang merupakan hasil evaluasi APIP atas AKIP Inspektorat pada pelaksanaan evaluasi Tahun Anggaran 2023. Sedangkan untuk capaian kinerja (*outcome*) berupa Indeks Kepuasan Masyarakat dan Inovasi masih belum dapat disajikan sehubungan belum dilakukan penilaian dan kemungkinan akan diketahui pada akhir atau setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2024.

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Outcome dari program ini ada 3 antara lain:

- Level/Nilai Kapabilitas APIP, Inspektorat hingga saat ini berada pada level 2 yang juga merupakan hasil evaluasi TA 2023;
- Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko, Inspektorat hingga saat ini berada pada level 2 yang juga merupakan hasil evaluasi TA 2023;

iii. Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, capaian terakhir yang dirilis oleh BPK hingga triwulan I Tahun 2024 masih sejauh hasil dari pelaksanaan pemantauan tindak lanjut pada semester 1 TA 2023 yaitu pada persentase 74,58 walaupun tidak menutup kemungkinan persentase ini sudah meningkat sebagai hasil dari pemantauan tindak lanjut pada semester 2 tahun 2023.

c. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Outcome dari program ini adalah level/nilai maturitas SPIP, untuk outcome ini juga masih menggunakan capaian pada akhir tahun 2023 yang lalu yang mana Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar masih berada pada level 2.

2. Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat

Masing-masing program yang disebutkan sebelumnya terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja untuk tahun 2024. Ada 10 (sepuluh) jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh inspektorat yang terdiri atas 28 (dua puluh delapan) jenis sub kegiatan. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan memiliki target dan capaian masing-masing yang selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat itu sendiri.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar disebutkan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dokumen laporan kinerja triwulan I merupakan hasil evaluasi kinerja selama 3 bulan yaitu bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024. Sesuai hasil pengukuran, evaluasi dan analisa kinerja terhadap 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

Pematangsiantar, Mei 2024
INSPEKTUR,



HERRI OKSTARIZAL, S.H, M.H, CGCAE
PEMBINA Tk. I
NIP.19810927 200502 1 001